

Analisis Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Bengkel Praktik Teknik Kendaraan Ringan pada SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman

Muhammad Faiz Najmuddin¹, Joko Sriyanto²

Departemen Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Yogyakarta

E-mail: muhammadfaiz.2022@student.uny.ac.id; joko_sriyanto@uny.ac.id

Abstract

This study analyzes the management of facilities and infrastructure in the Light Vehicle Engineering practical workshop at SMK X in Berbah, Sleman Regency, focusing on planning, procurement, maintenance, and disposal. A descriptive qualitative approach was employed from January to June 2026, with field data collected between May and June. Five informants were selected purposively: the principal, vice principal for facilities and infrastructure, head of the Light Vehicle Engineering department, a productive-subject teacher, and a workshop technician. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. Analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while credibility was strengthened through source and technique triangulation. The findings show that planning is conducted through needs identification, submission of requests, management meetings, and priority setting, but written medium-term plans and standardized procurement-priority criteria are not yet available. Procurement uses School Operational Assistance funds and committee funds, although budget limitations mean that practical equipment needs are fulfilled gradually. Maintenance involves the department head, teachers, and technicians, but no comprehensive routine maintenance schedule was found. Disposal begins with condition assessment and administrative proposals; however, supporting records and formal disposal documentation remain incomplete. These management weaknesses are associated with shortages of practical equipment that require students to use tools in turns, reducing individual practice time. The study recommends written medium-term planning, transparent priority criteria, scheduled preventive maintenance, and stronger documentation to improve accountability and support more effective vocational workshop learning.

Keywords: *workshop management; facilities and infrastructure; planning; maintenance; vocational education*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan sarana dan prasarana bengkel praktik Teknik Kendaraan Ringan di SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman yang mencakup aspek perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada Januari–Juni 2026, dengan pengambilan data lapangan pada Mei–Juni. Lima informan dipilih secara purposive, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, kepala jurusan Teknik Kendaraan Ringan, guru produktif, dan teknisi bengkel. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperkuat menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan, pengajuan, rapat manajemen, dan penetapan prioritas, tetapi belum tersedia rencana jangka menengah dan kriteria prioritas pengadaan yang baku secara tertulis. Pengadaan bersumber dari dana BOS dan dana komite, namun keterbatasan

anggaran menyebabkan pemenuhan alat praktik dilakukan bertahap. Pemeliharaan melibatkan kepala jurusan, guru, dan teknisi, tetapi belum ditemukan jadwal pemeliharaan rutin yang menyeluruh. Penghapusan diawali pemeriksaan kondisi dan pengajuan administratif, sedangkan dokumen pendukung dan berita acara belum terdokumentasi secara lengkap. Kelemahan tersebut berkaitan dengan keterbatasan alat praktik yang mengharuskan peserta didik menggunakan peralatan secara bergiliran dan mengurangi waktu praktik individual. Sekolah disarankan menyusun perencanaan jangka menengah tertulis, kriteria prioritas yang transparan, jadwal pemeliharaan preventif, dan dokumentasi yang lebih tertib.

Kata kunci: pengelolaan bengkel; sarana dan prasarana; perencanaan; pemeliharaan; pendidikan vokasi

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pendidikan mempunyai peran penting dalam memajukan masyarakat, melalui pendidikan dapat dihasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan karakter yang baik. Salah satu satuan pendidikan yang berperan besar menyiapkan SDM agar siap kerja adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK termasuk jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan guna memberi bekal peserta didik supaya mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahlian tertentu (UU No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan di SMK dirancang guna menyiapkan peserta didik supaya siap bekerja pada bidang tertentu serta memiliki tingkat kinerja yang memenuhi kebutuhan industri. Namun, pada kenyataannya permasalahan pengangguran pada lulusan SMK di Indonesia hingga kini masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Sebagaimana tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2025, menyatakan persentase pengangguran dari lulusan SMK berada di angka 8,63%, jumlah tersebut melampaui angka yang tercatat pada lulusan SMA dan perguruan tinggi.

Kondisi ini mendorong berbagai penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasarinya. Penelitian A'yunina (2020) menemukan faktor penyebab pengangguran pada lulusan SMK antara lain kurikulum yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan dunia industri, sarana prasarana sekolah yang kurang lengkap, kompetensi lulusan yang masih kurang seperti rasa percaya diri dan kesiapan kerja lulusan, keterserapan lulusan, serta kurangnya hubungan kolaborasi antara pihak sekolah dan pihak industri. Di antara faktor-faktor tersebut, sarana dan

prasarana sekolah menjadi aspek penting, terutama pada pendidikan kejuruan yang menekankan pembelajaran praktik.

Keterbatasan pada sarana dan prasarana, baik dari segi jumlah, kondisi, atau pemanfaatannya, dapat menghambat proses pembelajaran praktik sehingga kompetensi yang dimiliki lulusan menjadi kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan pengoperasian sarana dan prasarana di sekolah turut menentukan tingkat kesiapan lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana harus selaras dengan standar nasional yang sudah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pradita (2025), mengungkapkan bahwa kelengkapan fasilitas yang memadai dan mendukung menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, diperlukan pengelolaan sarana dan prasarana bengkel praktik yang dilakukan secara optimal dan sistematis.

Menurut Sambodo (2019), Pengelolaan sarana dan prasarana terdiri atas perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Pengelolaan yang kurang optimal dapat menyebabkan alat cepat rusak, tidak terawat, atau tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana bengkel praktik tersebut, diperlukan kajian mengenai bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana bengkel praktik dilakukan di sekolah kejuruan. Permasalahan serupa diduga juga terjadi di salah satu sekolah kejuruan di Kabupaten Sleman, yaitu SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman, yang memiliki program keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) dengan bengkel praktik sebagai penunjang utama kegiatan pembelajaran praktik.

SMK X, Kabupaten Sleman tergolong sebagai sekolah kejuruan swasta yang berlokasi di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil penelitian Putra (2024), menunjukkan bahwa kelayakan sarana praktik otomotif memiliki rata-rata 47,7% (kategori tidak layak). Hal tersebut juga didukung oleh temuan observasi yang dilaksanakan peneliti di SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman pada tanggal 24 Februari 2026, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana, seperti pembagian ruang bengkel praktik pada kompetensi keahlian TKR di SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman, yaitu kegiatan praktik mesin, *chassis*, dan

kelistrikan otomotif masih dilakukan dalam satu ruangan yang sama dengan luas ruangan yang kurang memadai, Beberapa *training object* yang digunakan sebagai media pembelajaran praktik juga belum tersedia, alat-alat pendukung yang digunakan pada pembelajaran praktik mesin diesel juga belum memadai, *stand* mesin diesel juga masih belum memenuhi standar ketersediaan. Permasalahan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pembelajaran praktik dan berdampak pada penguasaan keterampilan peserta didik.

Meskipun permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana di SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman telah teridentifikasi, hingga saat ini belum diketahui secara menyeluruh bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana bengkel praktik TKR tersebut dilaksanakan, khususnya yang mencakup aspek perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Tanpa pemahaman yang menyeluruh mengenai proses pengelolaan tersebut, sulit untuk menentukan pada aspek mana permasalahan sesungguhnya berakar dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya.

Dengan demikian, diperlukan penelitian untuk melakukan analisis mendalam mengenai pengelolaan sarana dan prasarana bengkel praktik TKR di SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman. Melalui analisis pengelolaan sarana dan prasarana tersebut, diharapkan mampu memperoleh gambaran kondisi nyata di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi dan perbaikan pihak sekolah pada peningkatan kualitas pembelajaran praktik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran praktik dan kompetensi lulusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengungkap secara mendalam proses pengelolaan sarana dan prasarana bengkel praktik TKR di SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman, mencakup aspek perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Januari-Juni 2026, dengan pengambilan data lapangan berlangsung pada 21 Mei-15 Juni 2026. Subjek ditentukan melalui teknik *purposive sampling* (Etikan et al., 2016) atas dasar keterlibatan langsung dalam pengelolaan sarana dan prasarana bengkel, meliputi lima

informan, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, kepala jurusan TKR, guru produktif TKR, dan teknisi bengkel.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan format semi-terstruktur, di mana pertanyaan disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah ditetapkan, namun peneliti tetap membuka ruang untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan menyesuaikan jawaban dan kondisi di lapangan. Setiap sesi wawancara berlangsung sekitar 30-45 menit, bertempat di ruang kerja masing-masing informan serta area bengkel praktik TKR SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman. Proses wawancara direkam menggunakan alat perekam suara pada ponsel, kemudian ditranskripsi secara manual oleh peneliti sebelum dianalisis lebih lanjut. Rincian pelaksanaan wawancara disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jadwal dan Lokasi Wawancara

Kode Informan	Jabatan	Hari, Tanggal	Waktu	Lokasi
IN1	Kepala Sekolah	Selasa, 26 Mei 2026	08.46 WIB	Ruang Kepala Sekolah
IN2	Waka Sarpras	Senin, 25 Mei 2026	08.40 WIB	Ruang Waka Sarpras
IN3	Kepala Jurusan TKR	Senin, 25 Mei 2026	09.14 WIB	Ruang Kajar TKR
IN4	Guru Produktif TKR	Senin, 25 Mei 2026	09.50 WIB	Ruang Guru/Bengkel TKR
IN5	Teknisi Bengkel	Senin, 25 Mei 2026	10.20 WIB	Bengkel Praktik TKR

Observasi dilakukan terhadap kondisi fisik dan administratif bengkel praktik TKR sebagai objek pengamatan, meliputi empat aspek, yaitu (1) administrasi bengkel, (2) penyimpanan sarana dan prasarana, (3) pemeliharaan sarana dan prasarana, dan (4) keselamatan kerja. Kegiatan observasi dilaksanakan sebanyak tiga kali kunjungan selama periode pengumpulan data, yaitu pada tahap awal, pertengahan, dan akhir pengambilan data, untuk memastikan konsistensi kondisi yang teramati dari waktu ke waktu.

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data wawancara serta observasi. Dokumen yang diminta dan diperoleh dalam penelitian ini meliputi data inventaris sarana dan prasarana bengkel, struktur organisasi pengelola bengkel praktik, foto kondisi bengkel, foto kegiatan penelitian, serta arsip pendukung seperti berita acara serah terima barang.

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan langsung dalam pengumpulan dan pemaknaan data (Sugiyono, 2023). Untuk menjaga konsistensi pengambilan data, peneliti menggunakan tiga instrumen bantu, yaitu

pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar periksa dokumentasi, yang seluruhnya disusun berdasarkan empat aspek pengelolaan sarana dan prasarana, yakni perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Kisi-kisi pedoman wawancara dan lembar observasi secara ringkas disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

Aspek	Indikator	Informan
Perencanaan	Penyusunan kebutuhan alat/bahan praktik, dasar perencanaan, keterlibatan guru dan teknisi	Kepsek, Waka Sarpras, Kajur, Guru, Teknisi
Pengadaan	Prosedur pengadaan, sumber dana, skala prioritas, kesesuaian standar alat	Kepsek, Waka Sarpras, Kajur, Guru, Teknisi
Pemeliharaan	Jadwal dan pelaksanaan perawatan, sistem penyimpanan, kelayakan alat	Kajur, Guru, Teknisi
Penghapusan	Pendataan alat tidak layak, kriteria penghapusan, arsip berita acara	Waka Sarpras, Kajur, Teknisi

Tabel 3 Kisi-Kisi Lembar Observasi

Aspek	Indikator
Administrasi bengkel	Tata tertib, SOP alat dan K3, jadwal penggunaan/pemeliharaan, kartu inventaris, sistem pelabelan dan penomoran
Penyimpanan sarpras	Label tempat penyimpanan, penataan alat sesuai jenis/fungsi
Pemeliharaan sarpras	Data alat rusak, pemisahan alat layak dan tidak layak
Keselamatan kerja	Ketersediaan APAR dan alat pelindung diri (APD)

Selain kedua instrumen di atas, digunakan pula daftar periksa dokumentasi untuk memastikan seluruh dokumen pendukung pada keempat aspek pengelolaan telah diperoleh, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Daftar Periksa Dokumentasi

Dokumen	Status
Data inventaris sarana dan prasarana bengkel	Diperoleh
Struktur organisasi pengelola bengkel praktik	Diperoleh
Foto kondisi bengkel praktik	Diperoleh
Foto kegiatan penelitian	Diperoleh
Berita acara serah terima barang/penghapusan	Diperoleh sebagian

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023), meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang berlangsung sejak sebelum, selama, hingga setelah pengumpulan data di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan keempat aspek pengelolaan sarana dan prasarana, sedangkan penyajian data disusun dalam bentuk kategorisasi berdasarkan aspek tersebut untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Data dianggap telah mencukupi apabila

jawaban dari kelima informan menunjukkan pola yang konsisten pada keempat aspek pengelolaan dan tidak lagi ditemukan informasi baru pada wawancara maupun observasi lanjutan (titik jenuh data).

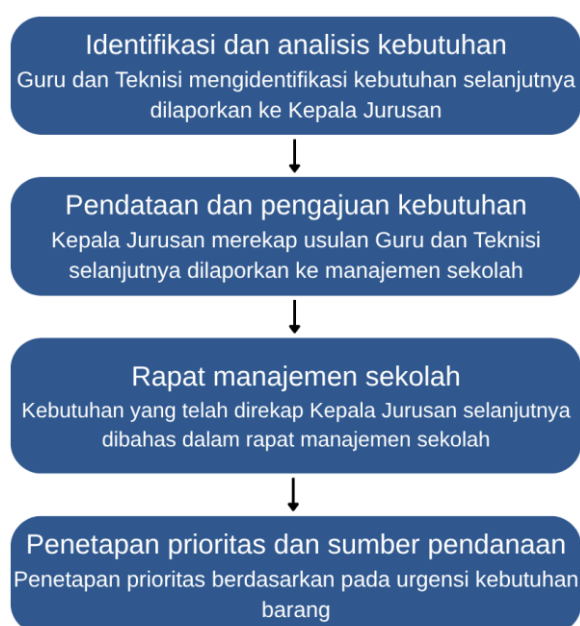
Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data antar-informan pada aspek yang sama, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara terhadap temuan observasi dan dokumentasi, sehingga simpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan (Creswell & Poth, 2018).

HASIL

Data penelitian mengenai pengelolaan sarana dan prasarana bengkel praktik TKR di SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman diperoleh melalui observasi, wawancara dengan lima informan, dan studi dokumentasi. Data tersebut direduksi dan disajikan berdasarkan empat aspek pengelolaan, yaitu perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Perencanaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana bengkel TKR berlangsung melalui empat tahap: identifikasi kebutuhan, pendataan dan pengajuan, rapat manajemen, serta penetapan skala prioritas, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Perencanaan Sarana dan Prasarana

Identifikasi kebutuhan dilakukan secara bottom-up oleh guru produktif dan teknisi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Guru produktif menjelaskan: "Ketika praktik ada kekurangan alat, biasanya kami melapor ke K3, kemudian K3 melaporkan ke sekolah untuk diajukan kepada kepala sekolah" (IN4). Hasil observasi memperkuat pernyataan tersebut. Peneliti tidak menemukan formulir identifikasi kebutuhan tertulis yang tersedia di bengkel, sehingga pelaporan kebutuhan cenderung berlangsung secara lisan dan insidental saat kekurangan alat dirasakan langsung selama praktik.

Kebutuhan yang telah teridentifikasi selanjutnya direkap oleh kepala jurusan sebelum diajukan ke bagian sarana dan prasarana. Kepala jurusan menyampaikan: "Di awal semester biasanya mengusulkan alat atau bahan yang akan dipakai untuk tahun ajaran berikutnya" (IN3). Temuan dokumentasi mendukung pernyataan ini, yaitu berupa daftar usulan kebutuhan barang yang disusun oleh kepala jurusan. Namun, peneliti tidak menemukan notulen rapat perencanaan yang terdokumentasi secara tertulis.

Kebutuhan yang telah direkap kemudian dibahas dalam rapat manajemen sekolah. Kepala sekolah menguraikan mekanismenya: Untuk perencanaan sarana dan prasarana di bengkel TKR itu dari manajemen sekolah, meliputi kepala sekolah dan seluruh wakil kepala sekolah. Setelah ada kesepakatan dari manajemen, kemudian diundang seluruh kepala jurusan untuk menyampaikan perencanaan satu tahun ke depan, kebutuhan dan anggaran, baru kemudian didistribusikan ke masing-masing jurusan (IN1). Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil observasi tidak mendapati rapat manajemen berlangsung selama periode pengambilan data, dan peneliti juga tidak memperoleh dokumen notulen rapat yang mencantumkan keputusan perencanaan sarana dan prasarana bengkel TKR secara rinci per unit barang.

Tahap akhir perencanaan adalah penetapan skala prioritas, terutama pada kebutuhan yang mendesak seperti bahan habis pakai. Waka Sarpras menegaskan prinsip penentuan prioritas antar jurusan: "Yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan, itu yang dulu diprioritaskan" (IN2). Dampak dari mekanisme prioritas ini dirasakan langsung oleh guru produktif, yang menyatakan bahwa dari lima alat yang diusulkan, biasanya hanya satu atau dua yang dapat direalisasikan dalam satu periode pengadaan (IN4). Triangulasi data perencanaan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Triangulasi Data Perencanaan Sarana dan Prasarana

Aspek	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Identifikasi kebutuhan	Guru dan teknisi menyampaikan kebutuhan secara lisan kepada kepala jurusan	Tidak ditemukan formulir identifikasi kebutuhan tertulis	Tidak ditemukan usulan kebutuhan tertulis dari guru/teknisi
Pendataan dan pengajuan	Kepala jurusan merekap usulan secara periodik (awal semester/tahun ajaran)	Tidak teramati langsung	Terdapat daftar kebutuhan hasil rekap kepala jurusan
Rapat manajemen	Melibatkan kepala sekolah, seluruh waka, dan kepala jurusan	Tidak teramati langsung	Tidak ditemukan notulen rapat
Skala prioritas	Bahan habis pakai dan alat rusak didahulukan	Tidak teramati langsung	Tidak ditemukan dokumen skala prioritas tertulis

Berdasarkan triangulasi tersebut, perencanaan sarana dan prasarana bengkel TKR telah melibatkan berbagai unsur sekolah secara sistematis, meski sebagian besar prosesnya belum didukung dokumentasi tertulis yang dapat diverifikasi secara langsung oleh peneliti.

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana bengkel TKR menggunakan dua sumber pendanaan, yaitu dana BOS dan dana komite sekolah, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 1. Alur Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kepala sekolah menjelaskan alasan penggabungan dua sumber dana tersebut: "Kalau BOS sendiri tidak bisa back up semua, jadi tetap ada gabungan antara BOS dengan dana komite" (IN1).

Penentuan sumber dana dilakukan berdasarkan hasil analisis bersama antara waka sarpras dan kepala jurusan, dengan mempertimbangkan jenis barang dan nilai pembelian. Mekanisme pembelian berbeda menurut sumber dananya. Waka sarpras menjelaskan: "Kalau lewat BOSNAS berarti bendahara lewat aplikasi SIPLah, biasanya di awal tahun. Kalau komite bisa beli langsung ke supplier, termasuk pembelian mendesak. Setelah barang sampai, dicek, difoto, lalu dibuat berita acara serah terima per jurusan (IN2)."

Temuan observasi memperkuat sebagian pernyataan ini, di mana peneliti tidak mendapati proses serah terima barang berlangsung selama pengambilan data. Dari sisi dokumentasi, peneliti memperoleh daftar inventaris sarana bengkel TKR, tetapi tidak mendapatkan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) maupun berita acara serah terima barang per jurusan.

Pencatatan barang di tingkat bengkel juga dilakukan secara mandiri oleh teknisi, sebagaimana disampaikan singkat: "Barang masuk dicatat, masuk ke bengkel, didata juga" (IN5).

Terkait kendala pengadaan, waka sarpras mengidentifikasi dua faktor utama: Yang pertama, mungkin di tahun itu belum diajukan karena pengajuannya per tahun. Yang kedua, sudah diajukan tetapi dananya belum mencukupi, karena harus dibagi ke lima jurusan sekaligus (IN2).

Lamanya proses pengadaan bervariasi tergantung nilai barang. Waka sarpras menambahkan bahwa dari pengajuan hingga terealisasi dapat memakan waktu satu hingga dua tahun, bahkan lebih (IN2). Dampak dari kendala tersebut dirasakan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru produktif menyampaikan: "Selama 2-3 tahun terakhir praktik dibagi dua kelompok, karena ketersediaan alat belum bisa memenuhi satu kelas langsung" (IN4).

Hasil observasi turut menemukan keterbatasan pada sejumlah alat praktik di bengkel, meskipun peneliti tidak mendapati kegiatan pembelajaran praktik berlangsung secara langsung selama pengambilan data. Triangulasi data pengadaan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Triangulasi Data Perencanaan Sarana dan Prasarana

Aspek	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Sumber dana	Kombinasi dana BOS dan komite	-	Tidak ditemukan dokumen RKAS
Mekanisme pembelian	BOS melalui SIPLah, komite langsung ke supplier	-	Tidak ditemukan dokumen pembelian barang
Pencatatan barang	Dicatat oleh sarpras dan teknisi bengkel	Tidak ditemukan buku catatan barang di bengkel	Terdapat daftar inventaris sarana bengkel TKR
Kendala pengadaan	Pengajuan belum konsisten tiap tahun, keterbatasan anggaran	Ditemukan keterbatasan pada sejumlah alat praktik	Tidak ditemukan dokumen skala prioritas pengadaan

Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan sudah berjalan melalui dua jalur prosedural yang berbeda, tetapi keterbatasan anggaran dan minimnya dokumentasi tertulis menyebabkan proses pengadaan sulit diverifikasi secara administratif.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana bengkel TKR dilaksanakan melalui kolaborasi kepala jurusan, teknisi, guru, dan peserta didik. Waka sarpras menjelaskan pembagian tanggung jawabnya: "Tanggung jawabnya yang pertama K3 dulu. Yang melaksanakan perawatan ada K3 sama toolman, toolman itu perawatan tiap hari" (IN2). Kepala jurusan menambahkan bahwa pelaksana pemeliharaan sebenarnya lebih luas: "Yang melaksanakan ada teknisi dan guru, nanti dijadwal. Guru, toolman, dan siswa berkolaborasi" (IN3).

Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Guru produktif mengungkapkan kondisi teknisi yang masih baru bertugas: "Toolman masih baru, sehingga masih tahap penyesuaian, mengingat jumlah alat di bengkel TKR cukup banyak" (IN4). Hasil observasi turut mendukung pernyataan ini, di mana peneliti tidak menemukan jadwal pemeliharaan tertulis yang terdistribusi secara resmi kepada seluruh pelaksana.

Salah satu bentuk pengawasan yang berjalan adalah sistem pencatatan peminjaman alat. Guru produktif menjelaskan: "Biasanya ketika pinjam alat, dari toolman atau guru kita tulis. Kalau ada kerusakan juga dicatat saat itu" (IN4). Meskipun demikian, peneliti tidak menemukan buku catatan peminjaman alat secara fisik di bengkel maupun dokumen pendukungnya.

Untuk pemeliharaan berkala, teknisi bengkel menyatakan bahwa jadwal rutin baru konsisten berjalan pada kendaraan praktik: "Kalau seperti mobil dilakukan sebulan sekali. Jadwalnya ada, kalau yang ini belum begitu paham" (IN5).

Terkait kerusakan alat, teknisi bengkel menjelaskan multimeter sebagai alat yang paling sering bermasalah, kemungkinan akibat kesalahan penggunaan (IN5). Triangulasi data pemeliharaan disajikan pada Tabel 7.

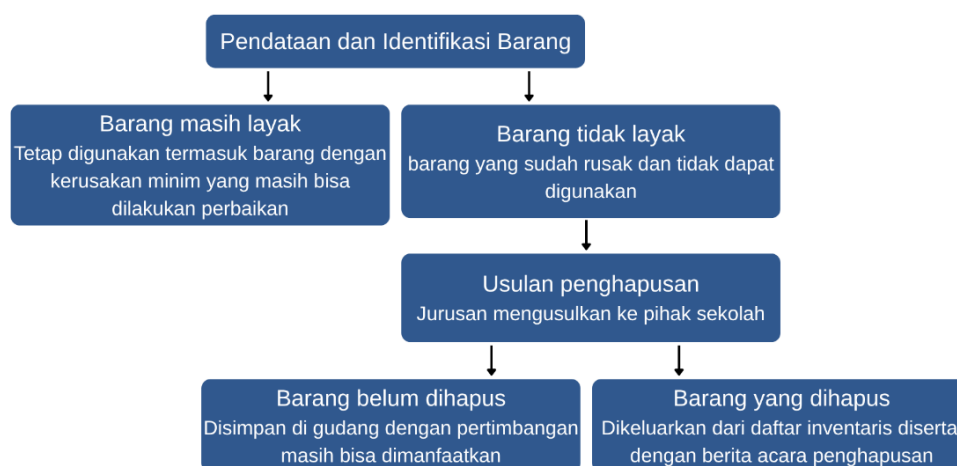
Tabel 7 Triangulasi Data Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aspek	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Penanggung jawab & pelaksana	Kepala jurusan sebagai penanggung jawab, teknisi sebagai pelaksana harian	Tidak mendapati proses pemeliharaan berlangsung	Tidak ditemukan dokumen pelaksanaan pemeliharaan
Pengawasan penggunaan alat	Pencatatan peminjaman alat oleh peserta didik	Tidak ditemukan buku catatan peminjaman	Tidak ditemukan dokumen pencatatan peminjaman
Kondisi alat	Bervariasi, ada yang layak dan tidak layak	Ditemukan sejumlah alat tidak layak pakai	Terdapat dokumentasi hasil observasi bengkel
Jadwal pemeliharaan berkala	Konsisten untuk kendaraan, belum optimal untuk alat lain	Tidak ditemukan jadwal pemeliharaan terbaru	Tidak ditemukan jadwal pemeliharaan tertulis menyeluruh

Temuan ini menunjukkan bahwa pemeliharaan sudah melibatkan pembagian peran yang jelas secara struktural, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih bergantung pada koordinasi informal tanpa acuan tertulis yang konsisten.

Penghapusan Sarana dan Prasarana

Penghapusan sarana dan prasarana bengkel TKR berlangsung melalui proses bertahap, meliputi pendataan barang, prosedur dan kewenangan penghapusan, serta perlakuan terhadap barang yang belum dihapus, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 2. Alur Penghapusan Sarana dan Prasarana

Waka sarpras menjelaskan mekanisme pendataan kondisi barang: "Setiap bulan kita data barang-barang apa saja yang sudah tidak layak. Kalau sudah tidak layak dimasukkan daftar barang tidak terpakai, tapi kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki dulu (IN2)."

Terkait prosedur, kepala jurusan menegaskan bahwa kewenangan penghapusan berada di tingkat sekolah: "Kami tidak bisa menghapus di unit. Ada berita acaranya melalui sarpras, nanti pengesahan dari sekolah" (IN3). Peneliti tidak memperoleh dokumen berita acara penghapusan maupun laporan penyusutan tahunan yang disampaikan kepada kepala sekolah dan yayasan, meskipun kedua informan menyatakan pelaporan tersebut dilakukan secara rutin.

Terkait barang yang belum dihapus, waka sarpras menjelaskan kebijakan penyimpanan sebelum dilakukan penghapusan resmi: "Yang sudah tidak dipakai biasanya ditunggu sampai 5 tahun dulu, nanti nunggu kalau ada akreditasi. Sebenarnya di sini ada yang bertahun-tahun masih ada, kaya mesin ketik itu masih di gudang belum disingkirkan (IN2)."

Hasil observasi mengonfirmasi masih adanya sejumlah alat konvensional yang tersimpan di gudang bengkel. Guru produktif menjelaskan pemanfaatan alat tersebut: "Kalau mau pembelajaran EFI tetap harus lewat konvensional dulu... kita sebagai guru mensiasatinya seperti itu" (IN4). Triangulasi data penghapusan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Triangulasi Data Penghapusan Sarana dan Prasarana

Aspek	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Pendataan dan identifikasi	Dilakukan rutin bulanan dan tahunan, dilaporkan ke kepala sekolah/yayasan	Terdapat hasil pendataan kondisi barang	Tidak ditemukan dokumen laporan penyusutan ke yayasan
Prosedur dan kewenangan	Jurusan hanya mengusulkan, pengesahan oleh sekolah	-	Tidak ditemukan dokumen berita acara penghapusan
Barang belum dihapus	Disimpan hingga 5 tahun, sebagian masih dimanfaatkan sebagai media pengenalan	Sebagian alat konvensional masih terlihat di gudang bengkel	Tidak ditemukan kriteria tertulis standar penghapusan

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses penghapusan telah memiliki kerangka administratif yang cukup jelas secara prosedural, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat penumpukan barang yang menunggu proses penghapusan resmi.

PEMBAHASAN

Perencanaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana bengkel TKR di SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman melibatkan berbagai pihak dari tingkat operasional (guru produktif, teknisi) hingga tingkat kebijakan (kepala jurusan, waka sarpras, kepala sekolah), melalui empat tahapan yang sejalan dengan Andreyanto et al. (2025): identifikasi kebutuhan, inventarisasi fasilitas, seleksi kebutuhan, dan penyediaan dana. Namun, kekurangan alat praktik yang masih ditemui saat pembelajaran berlangsung menunjukkan identifikasi kebutuhan belum optimal, sejalan dengan prinsip Barnawi dan Arifin (2012) bahwa perencanaan yang baik mensyaratkan analisis berkala terhadap kondisi barang. Ketiadaan mekanisme pemeriksaan dan dokumentasi terintegrasi ini juga sejalan dengan temuan Purwanto, Sudarwanto, dan Sukaswanto (2022), yang menegaskan pentingnya sistem informasi manajemen dalam mendukung pengelolaan dan pendistribusian informasi fasilitas laboratorium secara tepat.

Meskipun pendataan kebutuhan sudah didukung daftar usulan tertulis, ketiadaan notulen rapat menyebabkan proses penentuan prioritas yang seharusnya sistematis (Barnawi & Arifin, 2012) lebih banyak didasarkan pada urgensi situasional. Kondisi ini berbeda dengan temuan Nurdiansyah (2023) yang menemukan sekolah

lain telah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah sebagai instrumen formal. Pemenuhan kebutuhan yang berlangsung bertahap akibat keterbatasan anggaran ini konsisten dengan Arisandi (2021), yang menunjukkan bahwa kendala serupa merupakan pola umum pada sekolah dengan sumber daya terbatas. Secara keseluruhan, perencanaan sudah berjalan dengan koordinasi yang cukup baik, namun perlu diperkuat melalui mekanisme pemeriksaan berkala dan instrumen perencanaan jangka menengah yang lebih sistematis.

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan bersumber dari dana BOS dan komite sekolah, sejalan dengan Mulyasa (2013) bahwa pendanaan sarpras dapat berasal dari berbagai sumber. Mekanisme pembelian berjalan melalui dua jalur berbeda BOS via SIPLah dan komite langsung ke toko yang berbeda dari alur tunggal yang digambarkan Barnawi dan Arifin (2012), namun dapat dipahami sebagai adaptasi sekolah swasta penerima dana BOS terhadap dua aturan sekaligus. Praktik pencatatan dan pengecekan barang yang diterima sejalan dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan aset bengkel menurut Purwanto dan Sukardi (2015).

Ketiadaan dokumen RKAS, bukti pembelian, dan berita acara membuat transparansi pengadaan sulit diverifikasi peneliti, meski proses tersebut diklaim berjalan menurut informan. Kendala anggaran dan inkonsistensi pengajuan tahunan ini konsisten dengan Arisandi (2021), menunjukkan pola umum pada SMK bersumber daya terbatas penerapan skala prioritas yang ditekankan Barnawi dan Arifin (2012) pada praktiknya tetap bersifat situasional.

Dampak paling nyata dari kendala pengadaan adalah pembagian kelompok praktik menjadi dua kelas. Jika dirujuk pada standar rasio peralatan menurut Efendi et al. (2021), kondisi ini menunjukkan ketersediaan alat belum memenuhi standar. Temuan ini konsisten dengan Putra (2024) di sekolah yang sama (kelayakan sarana 47,7%, kategori tidak layak) dan Sudiyono dan Alip (2016) bahwa kesesuaian sarpras SMK swasta terhadap kurikulum umumnya lebih rendah dibandingkan SMK negeri mengindikasikan keterbatasan alat ini bersifat kronis, bukan sesaat. Dampaknya pun meluas hingga ke aspek keselamatan kerja, sebagaimana ditemukan Magefirah, Thalib, dan Yasdin (2025) bahwa sarana dan prasarana laboratorium berkontribusi signifikan (42,6%) terhadap sikap K3 siswa jurusan otomotif.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan berjalan melalui dua bentuk kegiatan sesuai Mulyasa (2013): tindakan pencegahan (pencatatan peminjaman) dan tindakan perbaikan (penanganan alat rusak). Keterlibatan kepala jurusan, teknisi, guru, dan peserta didik menunjukkan pembagian peran yang cukup jelas, sejalan dengan Barnawi dan Arifin (2012) soal pentingnya pengecekan berkala dan Hidayat dan Wahyuni (2016) soal pentingnya prosedur kerja yang jelas bagi keselamatan bengkel. Namun pelaksanaannya belum optimal karena teknisi yang masih baru dan koordinasi yang berjalan informal tanpa jadwal tertulis resmi.

Sistem pencatatan peminjaman alat sejalan dengan tujuan pengelolaan sarpras menurut Sambodo (2019), yaitu menciptakan keamanan sekaligus menanamkan tanggung jawab siswa. Penanaman tanggung jawab siswa melalui sistem pencatatan peminjaman alat ini juga sejalan dengan pentingnya penguatan pendidikan karakter pada mata pelajaran produktif SMK bidang otomotif, sebagaimana ditekankan Tafakur, Sudarwanto, Sriyanto, dan Sayyidi (2024). Namun, jadwal pemeliharaan berkala baru konsisten untuk kendaraan praktik, sementara teknisi belum sepenuhnya memahami jadwal alat lain mengindikasikan sosialisasi jadwal pemeliharaan yang belum merata, padahal Mulyasa (2013) menekankan pentingnya tindakan pencegahan rutin. Kerusakan multimeter akibat kesalahan penggunaan ditangani melalui perbaikan mandiri terlebih dahulu, sesuai prinsip tindakan perbaikan Andreyanto et al. (2025), namun berulangnya kerusakan menandakan pemahaman siswa terhadap prosedur penggunaan alat masih perlu diperkuat.

Penghapusan Sarana dan Prasarana

Prosedur penghapusan sejalan dengan tahapan Barnawi dan Arifin (2012): identifikasi kondisi, pemeriksaan kelayakan, pencatatan, berita acara, dan persetujuan berwenang. Kewenangan berjenjang jurusan sebagai pengusul, sekolah sebagai pengesah selaras dengan prinsip pertanggungjawaban Mulyasa (2013) untuk mencegah penghapusan sepihak. Namun, ketiadaan dokumen laporan dan berita acara yang dapat diverifikasi menunjukkan pola kesenjangan yang sama dengan aspek perencanaan dan pengadaan: praktik yang diklaim berjalan belum didukung bukti tertulis.

Kebijakan menyimpan barang tidak aktif hingga lima tahun, dikaitkan dengan momentum akreditasi, menunjukkan siklus penghapusan belum berjalan terjadwal berpotensi bertentangan dengan manfaat penghapusan menurut Barnawi dan Arifin

(2012), yaitu mengurangi biaya pemeliharaan barang tidak layak. Di sisi lain, sebagian alat konvensional yang sudah tidak tercantum kurikulum tetap dimanfaatkan sebagai media pengenalan dasar, menunjukkan bahwa nilai guna suatu alat tidak selalu hilang meski sudah tidak relevan secara kurikulum.

Keterkaitan Temuan dengan Permasalahan Awal

Permasalahan awal berupa keterbatasan ruang bengkel berkaitan dengan kapasitas bangunan yang berada di luar lingkup empat aspek pengelolaan yang diteliti. Sebaliknya, keterbatasan media pembelajaran dan alat praktik dapat dijelaskan langsung melalui temuan pengelolaan: keterbatasan anggaran, prioritas pengadaan yang situasional, dan absennya kriteria tertulis yang disepakati bersama menyebabkan kebutuhan tertentu berpotensi tertunda berulang dari tahun ke tahun.

KESIMPULAN

Pengelolaan sarana dan prasarana bengkel praktik TKR di SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman telah mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Perencanaan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, pengajuan, rapat manajemen, serta penetapan prioritas, tetapi belum didukung rencana jangka menengah dan kriteria prioritas pengadaan yang baku secara tertulis. Pengadaan memanfaatkan dana BOS dan dana Komite, namun keterbatasan anggaran menyebabkan pemenuhan alat praktik dilakukan secara bertahap.

Pemeliharaan melibatkan kepala jurusan, guru, dan teknisi, tetapi belum terdapat jadwal pemeliharaan rutin yang menyeluruh. Penghapusan diawali pemeriksaan kondisi barang dan pengajuan administratif, sedangkan dokumen pendukung dan berita acara belum terdokumentasi secara lengkap. Perbaikan utama yang disarankan adalah penyusunan perencanaan jangka menengah, kriteria prioritas pengadaan yang transparan, jadwal pemeliharaan preventif, serta dokumentasi pengelolaan yang lebih tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yunina, Q. (2020). Manajemen strategi pemerintahan Kota Yogyakarta dalam mengurangi angka pengangguran lulusan SMK di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Daerah*, 16(1), 61–79. <https://doi.org/10.70154/jid.v16i1.24>
- Andreyanto, F., Zulkifli, D., Mohzana, Aryesam, A., Sampe, N., & Ardianto, R. E. (2025). *Manajemen sarana dan prasarana*. Askara Sastra Media.
- Arisandi, R. (2021). *Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMKN 1 Rundeng Subulussalam*

- [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. Repository UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/27514/>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan, Agustus 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3OSMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>
- Barnawi, & Arifin, M. (2012). *Manajemen sarana dan prasarana sekolah*. Ar-Ruzz Media.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (Edisi ke-4). SAGE Publications.
- Efendi, Y., Ismara, K. I., Surjono, H. D., Khairudin, M., Nugraheni, M., Darmono, Fitrihana, N., Syauqi, K., Tafakur, Saputro, R., Sunardi, & Norman. (2021). *Norma dan standar laboratorium/bengkel SMK kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif*. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Hidayat, N., & Wahyuni, I. (2016). Kajian keselamatan dan kesehatan kerja bengkel di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik UNY. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 23(1), 51–66. <https://doi.org/10.21831/jptk.v23i1.9355>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah*. JDIH Kemendikbudristek. <https://peraturan.go.id/id/permendikbudristek-no-22-tahun-2023>
- Magfirah, N., Thalib, W., & Yasdin. (2025). Pengaruh sarana dan prasarana laboratorium terhadap sikap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) siswa SMKN 2 Bone. *Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif*, 8(1), 170–177. <https://doi.org/10.21831/jpvo.v8i1.91396>
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. PT Bumi Aksara.
- Nurdiansyah, M. A. (2023). *Implementasi manajemen sarana prasarana pada jurusan teknik kendaraan ringan di Sekolah Menengah Kejuruan Al-Qodiri Gumukmas Kabupaten Jember* [Skripsi sarjana, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. Digilib UIN KHAS Jember. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/30733>
- Pradita, D. T. (2025). *Studi kelayakan sarana dan prasarana bengkel praktik teknik otomotif kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan di SMKS Pancasila 7*

- Pracimantoro Wonogiri* [Skripsi sarjana tidak diterbitkan]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwanto, P., & Sukardi, T. (2015). Pengelolaan bengkel praktik SMK teknik pemesinan di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 22(3), 291–306. <https://doi.org/10.21831/jptk.v22i3.6836>
- Purwanto, P., Sudarwanto, S., & Sukaswanto, S. (2022). Sistem informasi manajemen pembelajaran pada pembelajaran praktikum laboratorium di Jurusan pendidikan Teknik Otomotif. *Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif*, 5(1), 110–119. <https://doi.org/10.21831/jpvo.v5i1.57772>
- Putra, M. D. S. (2024). *Studi kelayakan sarana dan prasarana bengkel praktik pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif di SMK X di Berbah, Kabupaten Sleman* [Skripsi sarjana tidak diterbitkan]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Sekretariat Negara.
- Sambodo, D. (2019). *Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/15000/>
- Sudiyono, S., & Alip, M. (2016). Evaluasi sarana dan prasarana bengkel praktik SMK teknik pemesinan di Kota Semarang berdasarkan kebutuhan kurikulum. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6(1), 79–93. <https://doi.org/10.21831/jpv.v6i1.8117>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Tafakur, T., Sudarwanto, S., Sriyanto, J., & Sayyidi, S. (2024). Muatan pendidikan karakter pada buku produktif SMK bidang otomotif sesuai kurikulum merdeka: Suatu analisis konten. *Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif*, 7(1), 124–137. <https://doi.org/10.21831/jpvo.v7i1.79435>